



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

Nomor: P.04/PKTL/SETDIT/KEU.0/10/2016

TENTANG

RENCANA KERJA

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017**

**DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 72/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016 telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut pada huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 ;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.40/Menlhk-II/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.72/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

16. Peraturan....

16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.11/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2017.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

Ttd.

PROF. DR. IR. SAN AFRI AWANG, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

Salinan sesuai aslinya,
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Jakarta: 12 Oktober 2016



Ir. Bowo Heri Satmoko
NIP. 19591222 198603 1 015

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P. 4/PKTL/SETDIT/Keu.0/10/2016

Tanggal : 11 Oktober 2016

TENTANG

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, serta merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Perubahan Paradigma perencanaan pembangunan dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program* dimana seluruh program dan kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dan mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional dan berorientasi manfaat untuk rakyat.

Secara umum prioritas nasional pembangunan tidak dapat terlepas dari peran Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terutama dalam hal penyediaan/alokasi sumberdaya lahan serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian sasaran lima prioritas nasional yaitu kedaulatan pangan dalam hal kepastian penyediaan/pencadangan kawasan hutan untuk pembangunan sawah baru dan areal pangan lainnya, kedaulatan energi terutama dalam pengendalian produksi energi primer dalam kawasan hutan, maritim dan kelautan terutama dalam memastikan kualitas dan kelayakan kajian lingkungan hidup strategis dari tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir, reforma agraria, dan pembangunan pedesaan dalam hal alokasi sumberdaya, tata ruang wilayah dan pemanfaatan sumberdaya hutan berkelanjutan.

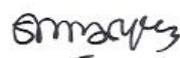
Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah.

Rencana kerja ini selanjutnya menjadi acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Oktober 2016

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. MENUJU KAWASAN HUTAN YANG MANTAP DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN	1
A. Review Target dan Capaian Kegiatan s/d 2016	1
B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.....	6
C. Tujuan dan Arah Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2017	8
BAB II. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017.....	10
BAB III. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017.....	22
BAB IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN	

I. MENUJU KAWASAN HUTAN YANG MANTAP DAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

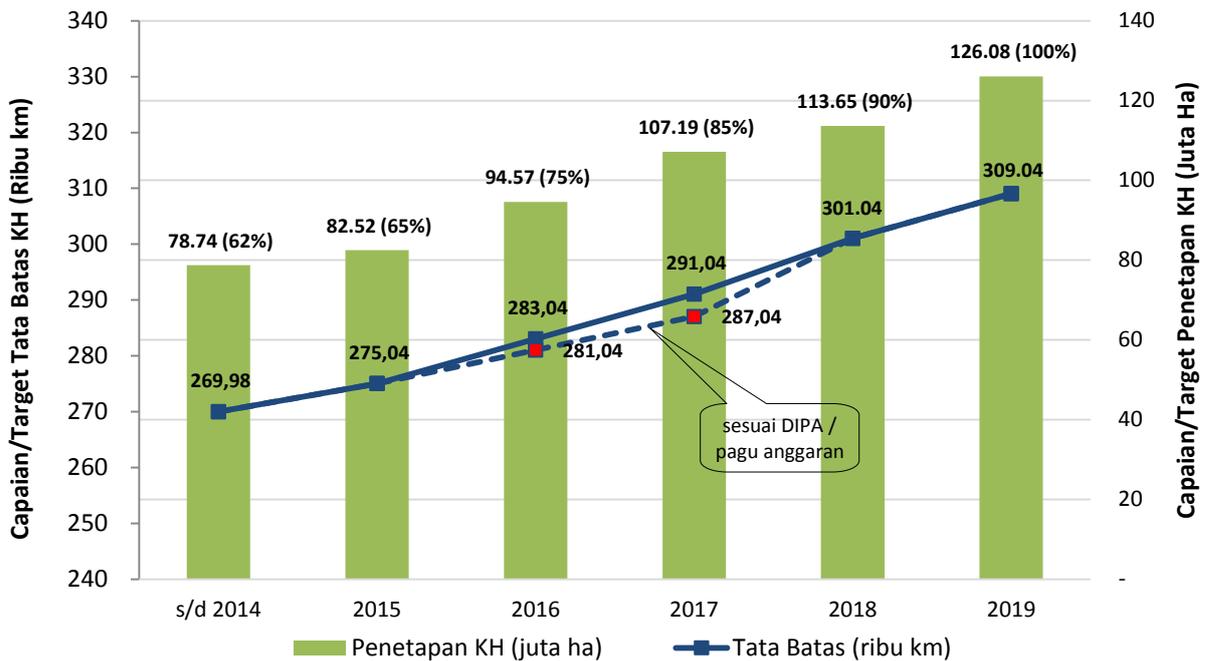
A. Review Target dan Capaian Kegiatan s/d 2016

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMN Tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan sampai dengan tahun 2017 akan menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola hutan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan yang dimulai dengan memberikan kejelasan status hukum (legal) sebuah kawasan hutan sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak diantaranya melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola (KPH) serta memastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator) dalam pengelolaan kawasan hutan. Terkait tata lingkungan, arah kebijakan dalam periode 2015-2019 adalah memastikan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2015 serta prognosis kegiatan tahun 2016, capaian kinerja planologi kehutanan dan tata lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan



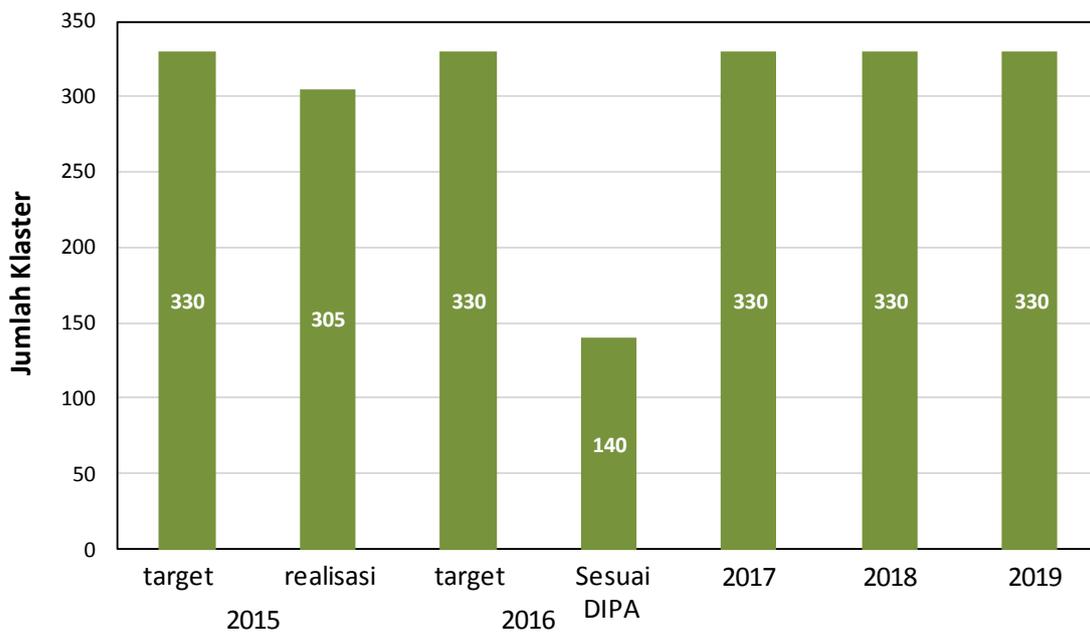
Gambar 1. Capaian dan Target Tata Batas dan Penetapan Kawasan Hutan

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, total panjang batas kawasan hutan yang telah ditata batas adalah sepanjang 269,98 ribu km dengan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan adalah 78,74 juta ha atau sekitar 62% persen dari luas kawasan hutan. Dalam periode pembangunan tahun 2015-2019 seluruh kawasan hutan diharapkan sudah ditetapkan, sehingga selama periode 5 tahun tersebut kawasan hutan yang harus ditetapkan dengan target tata batas sebagaimana Gambar 1 di atas.

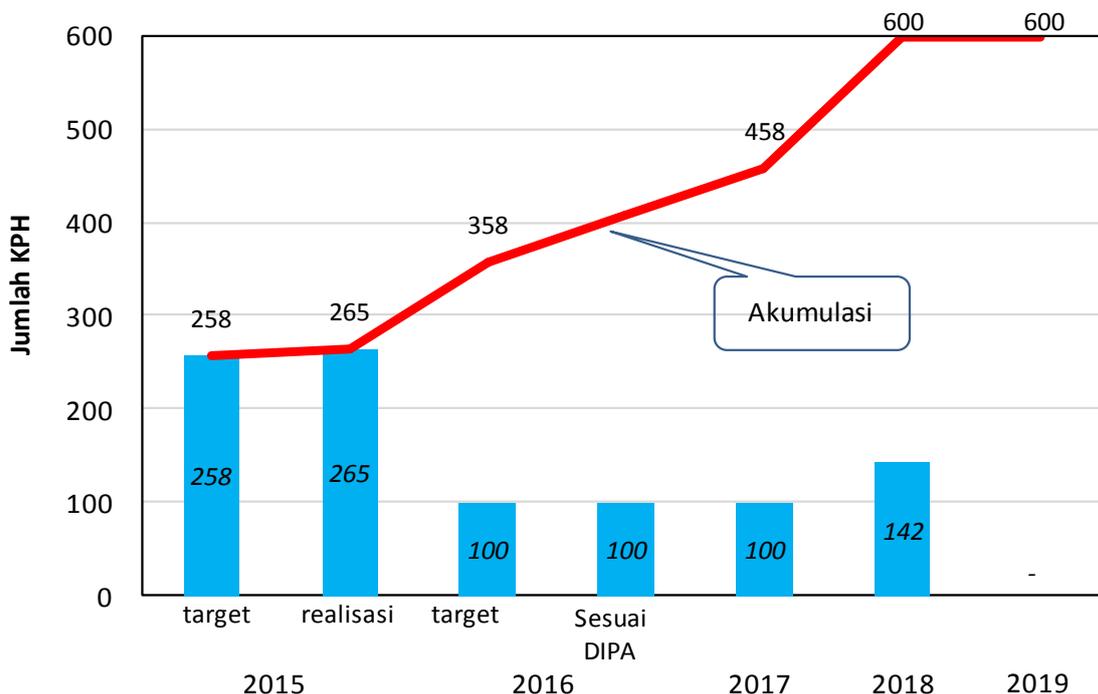
Meskipun realisasi tata batas dan penetapan kawasan hutan tahun 2015 telah mencapai target yang ditetapkan (tata batas 6.848 km dan penetapan kawasan hutan telah mencapai 65%), namun dengan memperhitungkan tata batas tahun 2016 yang tidak mencapai target yang ditetapkan (hanya 6.106 km dari 8.000 km) maka ditahun 2017 perlu dilakukan percepatan dan penambahan target tata batas dari semula 8.000 km menjadi minimal 9.050 km sebagai upaya mencapai penetapan kawasan hutan minimal 85% di tahun 2017. Namun demikian, sesuai pagu anggaran tahun 2017, target tata batas maksimal hanya 4.000 km, sehingga percepatan dan penambahan target tata batas tersebut harus dilakukan di tahun 2018 dan 2019.

Pelaksanaan tata batas dilaksanakan selain sebagai upaya memberikan kejelasan status hukum (legal) atas kawasan hutan, juga untuk mendapatkan pengakuan/legitimasi publik atas kawasan hutan (produk tata batas) serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan atau disekitar kawasan hutan.

2. Data dan Informasi Sumberdaya Hutan



Gambar 2. Target (RPJMN/Renstra dan sesuai alokasi anggaran) dan Realisasi Kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Hutan



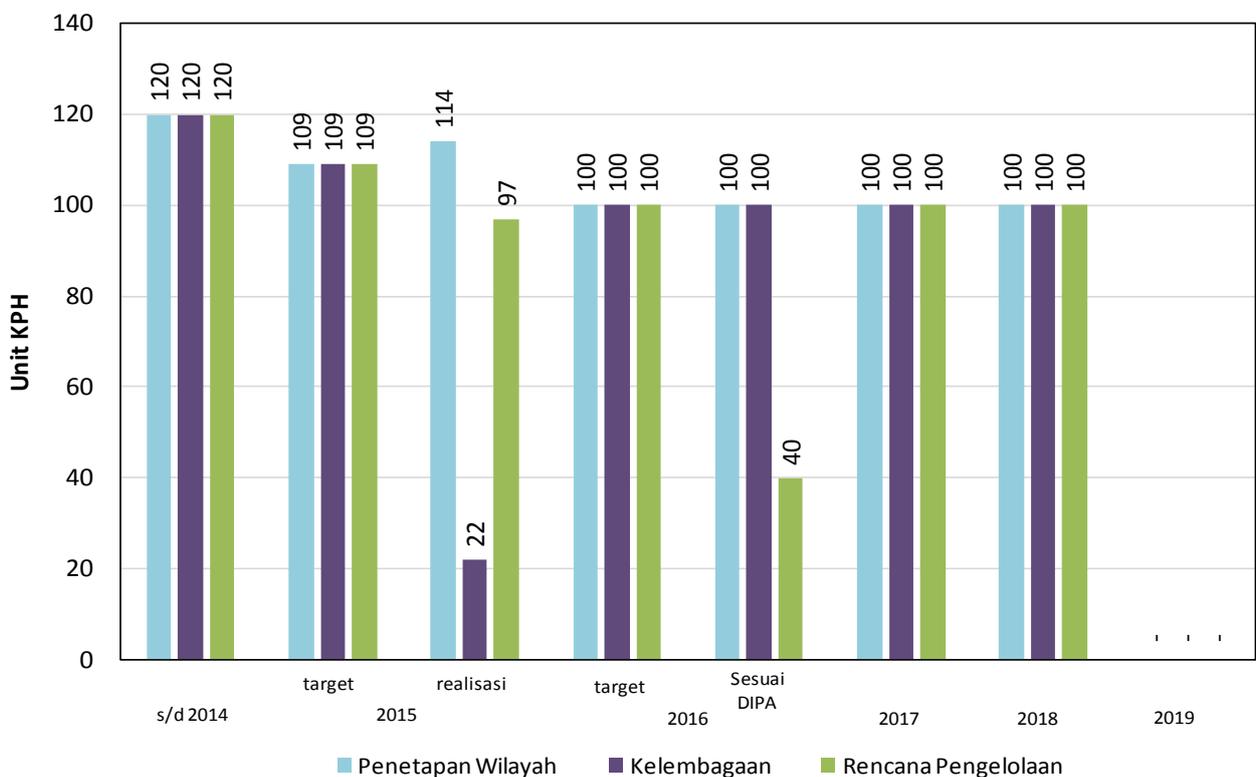
Gambar 3. Target (RPJMN/Renstra dan sesuai alokasi anggaran/DIPA) dan Realisasi Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan

Dalam periode 2015-2019, dalam upaya penyediaan data informasi sumberdaya hutan nasional yang sekaligus mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak (KPH) telah ditetapkan target inventarisasi sumberdaya hutan (enumerasi/reenumerasi) sebanyak 1.650 klaster atau 330 klaster per tahun. Berdasarkan realisasi kegiatan inventarisasi sumberdaya hutan sampai tahun 2015 serta berdasarkan alokasi anggaran sesuai DIPA

Tahun 2016 maka sampai Tahun 2016 target 660 klaster hanya dapat tercapai maksimal sebanyak 445 klaster atau 67% dari target Tahun 2016. Sisa target yang belum tercapai sejumlah 215 klaster direncanakan diakumulasikan pada tahun 2017 sehingga total target tahun 2017 menjadi 545 klaster. Dengan terpenuhinya target inventarisasi sumberdaya hutan (1.650 klaster sampai tahun 2019) diharapkan data dan informasi terkait sumberdaya hutan dapat lebih akurat dan valid sebagai input utama dalam penyusunan data potensi hutan nasional serta neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional.

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan dasar penting dalam perencanaan dan pengelolaan hutan baik di tingkat nasional sampai pada tingkat unit pengelolaan. Melalui hasil enumerasi dan reenumerasi serta inventarisasi hutan (biofisik dan sosial budaya) ditingkat unit pengelolaan (KPH), data dan informasi sumberdaya hutan diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak.

3. Fasilitasi Pembangunan KPH



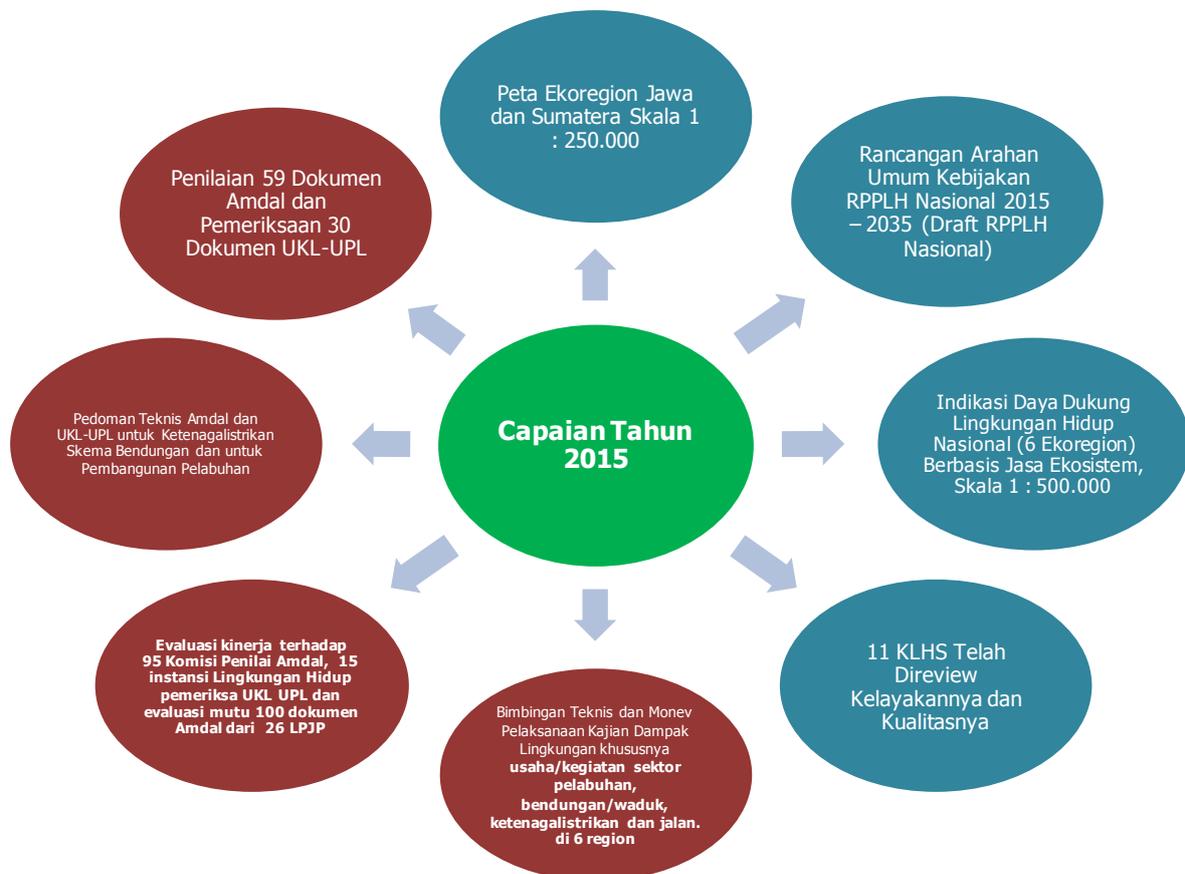
Gambar 4. Target (RPJMN/Renstra dan sesuai alokasi anggaran) dan Realisasi Kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPH

Sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka tata kelola hutan adalah dengan membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif. Tahapan penting untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Sampai

tahun 2014, 120 KPH telah selesai dibentuk (penetapan wilayah, kelembagaan dan rencana pengelolaan hutan). Pada periode 2015-2019 ditargetkan 409 unit KPH selesai difasilitasi pembentukannya. Sampai dengan tahun 2015, 114 KPH telah ditetapkan wilayahnya, 20 KPH telah memiliki kelembagaan dan 97 KPH telah menyusun rencana pengelolaan hutan. Dengan memperhitungkan target tahun 2016 sesuai alokasi anggaran, maka untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 perlu percepatan pelaksanaan dan penambahan target kegiatan di tahun 2017, terutama dalam mendorong serta memfasilitasi pemerintah daerah membentuk lembaga KPH melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta penguatan dalam peraturan implementasi/turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014.

4. Penataan lingkungan hidup

Penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan setiap usaha dan kegiatan. Terkait hal tersebut, hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.



Gambar 5. Capaian utama upaya penataan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2015

Sesuai Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah bertugas dan berwenang antara lain dalam:

- Menetapkan kebijakan nasional
- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL
- Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup
- Menerbitkan izin lingkungan
- Menetapkan wilayah ekoregion

Atas dasar tersebut maka fokus utama yang dilakukan adalah penyiapan instrumen (NSPK) dan menetapkan kebijakan baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup maupun penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, secara konsisten harus pula dipastikan bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan, target peningkatan kualitas lingkungan hidup diketahui dan diproyeksikan dengan baik. Disisi lain, pelaksanaan kebijakan di bidang AMDAL, UKL-UPL, dan Audit Lingkungan Hidup harus tetap dijalankan dengan standar pelayanan yang terus meningkat.

B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2017, telah ditetapkan beberapa dimensi pembangunan yang didalamnya terdiri dari berbagai program dan kegiatan prioritas nasional yang harus dicapai oleh seluruh Kementerian/Lembaga secara holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Paradigma perencanaan yang selama ini digunakan yaitu *Money follow function* dimana perencanaan dan penganggaran kegiatan didasarkan atas tugas dan fungsi telah bergeser menjadi *Money follow Program*, dalam arti fokus anggaran berdasarkan prioritas program yang mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan dan berorientasi manfaat untuk rakyat.

Seluruh program dan kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dan mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional. Sebagai contoh untuk Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah. Pencapaian Kedaulatan Pangan juga perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktivitas lahan yang ada, menghentikan konversi lahan produktif, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan). Selain itu secara spasial, pembangunan sawah baru terkait kedaulatan pangan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.



Gambar 6. Dimensi dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017

Secara umum prioritas nasional pembangunan tersebut tidak dapat terlepas dari peran Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terutama dalam hal penyediaan/alokasi sumberdaya lahan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (amdal, kajian lingkungan hidup strategis, izin lingkungan, dan lain sebagainya). Secara khusus, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian sasaran lima prioritas nasional yaitu kedaulatan pangan dalam hal kepastian penyediaan/pencadangan kawasan hutan untuk pembangunan sawah baru dan areal pangan lainnya, kedaulatan energi terutama dalam pengendalian produksi energi primer dalam kawasan hutan, maritim dan kelautan terutama dalam memastikan kualitas dan kelayakan kajian lingkungan hidup strategis dari tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir, reforma agraria, dan desa dan kawasan pedesaan dalam hal alokasi sumberdaya, tata ruang wilayah dan pemanfaatan sumberdaya hutan berkelanjutan.

C. Tujuan dan Arah Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2017 merupakan:

1. Acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2017 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsikawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Sesuai tujuan utama pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yaitu sebagai prakondisi/pemungkin pembangunan nasional, sasaran dan indikator program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara umum telah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP tahun 2017. Program Planologi Kehutanan berperan penting dalam memastikan alokasi sumberdaya lahan baik untuk menunjang pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan maupun dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan kewilayahan. Secara khusus, mengikuti

dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2017, maka terdapat beberapa sasaran dan indikator kegiatan dalam rencana kerja Ditjen PKTL Tahun 2017 yang mendapat perubahan maupun penajaman.



Gambar 7. Sasaran Program dan Kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

2. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2017

Pada prinsipnya program dan kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan pemungkin/*enabling* tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional. Secara khusus, Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional kedaulatan pangan, reforma agraria, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta desa dan kawasan perdesaan.

Secara rinci, kegiatan, saasaran dan indikator serta target untuk tahun 2017 pada Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokus Prioritas	Target **)
Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% dari seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	34 Provinsi	10 % tambahan penetapan kawasan hutan di 2017
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltim, Kaltara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,	1 juta ha

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokus Prioritas	Target **)
			Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku , Maluku Utara, Papua , Papua Barat	
	Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, NTB, N T T, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltim, Kaltara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	4,1 jt ha
	Tersedianya dan Tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	34 Provinsi	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah
	Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untk/pada lokasi permukiman transmigrasi	Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	34 Provinsi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)
		Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, NTB, NTT, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kaltim, Kaltara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	Tambahan 100 KPH di tahun 2017

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokus Prioritas	Target **)
		Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	34 Provinsi
Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dalam rangka ketahanan energi	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Bali Nusa Tenggara	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
	Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	28 Provinsi (diluar Jawa)	Minimal 172 KPH
		Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	34 Provinsi (seluruh Indonesia)	Data dan peta arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100 KPH
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100 KPH
	Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Nasional (Pusat)	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan , Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Nasional (Pusat) dan 6 wilayah pesisir (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel)	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya
	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Lokus prioritas tersaji pada halaman selanjutnya	170 KLHS
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Lokus prioritas tersaji pada halaman selanjutnya	187 KLHS

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokus Prioritas	Target **)
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	Nasional (Pusat)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Kalimantan dan Sumatera	8 RPPLH
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Kalimantan dan Sumatera	10 RPPLH
		Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Nasional	1 penetapan indikasi DD DT Nasional
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jawa, Bali, Nusa Tenggara	12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusra.
	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Nasional (34 provinsi)	Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	Nasional dan 34 Provinsi	100%
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	Nasional dan 34 Provinsi	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokus Prioritas	Target **)
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	Rincian pada Matrik Evaluasi Kinerja KPA berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL	KPA, Pemeriksa UKL UPL dan LPJP di 34 Provinsi dan 68 Kab/Kota , 2 Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta Evaluasi mutu Dokumen Amdal yang Disusun oleh LPJP dan Perorangan
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan	34 Provinsi	9.010 km*
		Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	28 Provinsi (diluar Jawa)	172 KPH*
		Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1.650 Klaster	27 Provinsi	545 klaster *
Dukungan Manajemen (termasuk belanja pegawai dan operasional untuk seluruh program)	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point), target 2017 : 75 point	Nasional (Pusat)	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017

Ket: * akumulasi target tahun 2017 serta target tahun 2015 dan 2016 yang belum tercapai sesuai RPJMN/Renstra Tahun 2015-2019

** merupakan target maksimal dan akan disesuaikan kembali berdasarkan ketersediaan anggaran

Sekitar 70 persen pelaksanaan kegiatan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan khususnya terkait dengan penyiapan pemantapan kawasan hutan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang berada di 22 wilayah seluruh Indonesia. Rincian target beberapa kegiatan utama tahun 2017 yang dilaksanakan di BPKH antara lain kegiatan penataan batas kawasan hutan, fasilitasi pembangunan KPH (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan), inventarisasi sumberdaya hutan (enumerasi dan re-enumerasi TSP/PSP), inventarisasi dan verifikasi kawasan hutan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya serta inventarisasi dan verifikasi Tanah Objek Reforma Agraria dalam kawasan hutan kawasan hutan.

A. Penataan Batas Kawasan Hutan

Pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan tahun 2017 sesuai RPJMN dan Renstra adalah sepanjang 8.000 km merupakan tahapan ketiga dari pencapaian

target penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km sampai tahun 2019. Dengan tahapan target tata batas tersebut diharapkan penetapan kawasan hutan di tahun 2017 mencapai 85% dari target minimal yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019. Namun demikian, akibat keterbatasan anggaran terdapat target tata batas yang tidak dapat tercapai di tahun 2016, maka untuk mencapai target penetapan di tahun 2019 maka perlu ada percepatan penataan batas kawasan dengan menambah target tata batas di tahun 2017, 2018 dan/atau tahun 2019.

BPKH	Target Tata Batas Tahun 2017	
	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)
BPKH Wilayah I Medan	-	1.000
BPKH Wilayah II Palembang	22	254
BPKH Wilayah III Pontianak	337	820
BPKH Wilayah IV Samarinda	-	642
BPKH Wilayah V Banjarbaru	244	221
BPKH Wilayah VI Manado	260	712
BPKH Wilayah VII Makassar	85	111
BPKH Wilayah VIII Denpasar	12	-
BPKH Wilayah IX Ambon	7	141
BPKH Wilayah X Jayapura	300	200
BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	-	12
BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	-	868
BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	-	134
BPKH Wilayah XIV Kupang	-	235
BPKH Wilayah XV Gorontalo	-	22
BPKH Wilayah XVI Palu	-	825
BPKH Wilayah XVII Manokwari	89	516
BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	145	343
BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	283	317
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	-	153
BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	2.400	1.019
BPKH Wilayah XXII Kendari	-	390
Total	4.184	8.935

Ket: Total target tata batas (batas luar dan batas fungsi) di atas adalah 13.119 km yang merupakan usulan target pelaksanaan tata batas dari 22 BPKH.

B. Fasilitas Pembangunan KPH (Rancangan Penataan Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan)

Fasilitas pembangunan KPH diarahkan pada upaya penyiapan/prakondisi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH melalui fasilitas rancangan tata hutan dan penyusunan rancangan rencana pengelolaan hutan. Dengan adanya rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan diharapkan tata kelola hutan di wilayah KPH lebih terintegrasi dan selanjutnya dapat dikembangkan oleh KPH dengan melakukan pendetailan serta mengakomodasi target pembangunan kehutanan nasional/provinsi pada tingkat tapak.

BPKH	Provinsi	Jumlah KPH (target 2017)			Jumlah KPH (sisa target 2015 dan 2016)		
		KPHL	KPHP	Total	KPHL	KPHP	Total
Wilayah I Medan	Sumatera Utara	6	3	8	-	-	-
	Sumatera Barat	1	-	1	2	-	2
Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	3	1	4	-	4	4
Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	-	8	8	2	6	8
Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	-	2	3	-	3	3
	Kalimantan Utara	-	3	3	1	3	4
Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	-	2	2	-	-	-
Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara	-	3	3	1	-	1
	Maluku Utara	2	3	5	-	1	1
Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan	3	1	3	2	-	2
	Sulawesi Barat	2	-	1	-	-	-
Wilayah VIII Denpasar	Bali	-	-	-	-	-	-
	NTB	-	-	2	-	-	-
Wilayah IX Maluku	Maluku	1	4	5	1	-	1
Wilayah X Jayapura	Papua	9	8	13	4	5	9
Wilayah XI Jawa Madura	Pulau Jawa	-	-	-	-	-	-
Wilayah XII Tj. Pinang	Kep. Riau	-	1	1	1	-	1
Wilayah XIII Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	1	-	2	1	-	1
	Jambi	-	4	4	-	5	5
Wilayah XIV Kupang	NTT	-	1	1	-	-	-
Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	-	-	-	1	-	1
Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	3	-	3	-	-	-
Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	-	5	5	1	-	1
Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	-	-	-	2	-	2
Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	1	5	6	-	12	12
Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung	-	1	1	1	-	1
	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	-	8	9	1	9	10
Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	3	2	7	3	-	3
Jumlah		35	65	100	24	48	72

Sumber: Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

C. Penyediaan Data Informasi Sumber Daya Hutan (Enumerasi/Reenumerasi)

Dalam rangka penyediaan data dan informasi sumber daya hutan nasional dilaksanakan kegiatan Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP yang diharapkan dapat menjadi salah satu basis data di dalam perencanaan ruang kawasan hutan serta mendukung operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

BPKH	Provinsi	Jumlah Klaster (target 2017)			Jumlah Klaster (sisa target 2015 dan 2016)		
		Enumerasi	Reenumerasi	Total	Enumerasi	Reenumerasi	Total
Wilayah I Medan	Sumatera Utara	-	7	7	-	-	0
	Sumatera Barat	-	7	7	7	-	7
Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	-	10	10	1	-	1
Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	-	18	18	6	8	14
Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur	-	24	24	8	10	18
	Kalimantan Utara	-	11	11	11	-	11
Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1	11	12	-	5	5
Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara	-	4	4	-	5	5
	Maluku Utara	-	8	8	-	11	11
Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan	-	10	10	-	5	5
	Sulawesi Barat	-	5	5	-	5	5
Wilayah VIII Denpasar	Bali	-	2	2	-	-	0
	NTB	-	8	8	3	-	3
Wilayah IX Maluku	Maluku	-	11	11	-	4	4
Wilayah X Jayapura	Papua	-	34	34	27	16	43
Wilayah XI Jawa Madura	Pulau Jawa	16	-	16	9	-	9
Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	8	2	10	1	-	1
Wilayah XIII Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	1	-	1
	Jambi	5	6	11	-	10	10
Wilayah XIV Kupang	NTT	-	10	10	2	-	2
Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	-	8	8	-	-	0
Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	20	0	20	13	-	13
Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	-	23	23	13	-	13
Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	11	-	11	4	-	4
Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	10	-	10	5	-	5
Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung	4	-	4	4	-	4
	Bengkulu	6	-	6	-	-	0
Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	20	-	20	-	7	14
Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	-	10	10	-	10	10
Jumlah		101	229	330	122	96	219

Sumber: Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Selain tiga kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, selain kegiatan yang dilakukan pada level nasional (pusat), telah diidentifikasi lokus pelaksanaan kegiatan tahun 2017

yang targetnya tersebar berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, diantaranya sebagai berikut:

A. Review Kelayakan dan Penjaminan Kualitas KLHS berbasis DD DT

	Target Tahun 2017	Tambahan target (sisa target 2015 dan 2016)
Provinsi	Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara	DKI Jakarta
Kab/Kota	(Sumatera Utara : Kota Medan, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kab. Asahan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar) (Sumatera Barat : Kab. Solok, Kota Bukit Tinggi, Kab. Pasaman Barat, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam) (Riau : Kab. Indragiri Hulu, Kab. Bengkalis, Kota Dumai) (Sumatera Selatan : Kab. Musirawas Utara, Kab. Ogan Komering Hulu, Kab. Ogan Ilir, Kab. Musi Rawas) (Bengkulu : Kab. Muko-muko, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan) (Lampung : Kab. Lampung Selatan, Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Bandar Lampung, Kab. Lampung Tengah) (Kep. Bangka Belitung : Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat) (Kep. Riau : Kab. Bintan) (Jawa Barat : Kab. Pangandaran, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung) (Jawa Tengah : Kota Semarang, Kab. Kebumen, Kab. Boyolali, Kota Pekalongan, Kab. Kendal, Kota Magelang, Kab. Wonosobo) (DI Yogyakarta : Kab. Bantul, Kab. Sleman) (Jawa Timur : Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Mjokerto, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang, Kab. Sidoarjo) (Banten : kota Cilegon, Kab. Serang) (Bali : Kab. Badung, Kab. bangli, Kab. tabanan, Kota Denpasar) (NTB : Kab. Lombok Utara, Kab. Bima, Kota Mataram, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Tengah) (NTT : Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai) (Kalbar : Kab. bengkayang, Kab. Sintang) (Kalsel : Kab. Kota Baru, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin) (Kaltim : Kab. Mahakam ulu, Kab. Paser) (Kaltara : Kab. Tana Tidung, Kab. Bulungan) (Sultra : Kab. Bolmong Timur, Kota Manda, Kab. Minahasa Selatan, Kab. Kolaka Timur, Kab. Muna) (Sulteng : Morowali Utara, Kab. Poso, Kab. Toli-Toli, Kota Palu) (Sulsel : Kab. Pangkajene Kep., Kab. Gowa, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara) (Gorontalo: Kab. Gorontalo) (Sulbar : Kab. Mamuju tengah, Kab. Mamuju) (Maluku : Kab. Seram Bagian Barat, Kota Ternate, Kab. Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan) (Papua : Kab. Nabire) (Papua : Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni)	(Sumatera Utara : Kab. Toba Samosir, Kab. Labuhan Batu, Kab. Samosir, Kab. Simalungun) (Sumatera Barat : Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam) (Riau : Kab. Kep. Meranti) (Sumatera Selatan : Kab. OKU Selatan, Kab. OKU Timur) (Bengkulu : ab. Seluma, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong) (Lampung : Kab. Pesisir Barat, Kab. Way Kanan) (Kep. Riau : Kab. Lingga) (Jawa Barat : Kab. Indramayu, Kab. Karawang) (Jawa Tengah : Kab. Purbalingga, Kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten) (Yogyakarta: Kab. Gunung Kidul) (Jawa Timur : Kota Blitar, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Pasuruan, Kab. Sumenep) (Bali : Kab. Karang Asem) (NTB : Kab. Dompus, Kab. Lombok Tengah) (NTT ; Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat) (Kalbar : Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kab. Ketapang) (Kalsel : Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tanah Bumbu) (Kaltim : Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kota Samarinda) (Sultra : Kab. Minahasa Utara, Kab. Balmong Selatan, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Tengah, Kab. Bone Bolango, Kab. Pohuwato) (Sulteng : Kab. Banggai Laut, Kab. Sigi) (Sulsel : Kab. Maros, Kab. Kep. Selayar, Kab. Soppeng) (Sulbar : Kab. Mamuju Utara) (Maluku Utara : Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahahe Utara) (Papua : Kab. Asmat) (Papua Barat : Kab. Fakfak)

B. Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH dan PDRB Hijau

Penyusunan SDA LH dan PDRB Hijau dilaksanakan terutama untuk menyediakan dan update data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup (neraca SDA LH

dan PDRB Hijau) sebagai bahan penyusunan neraca SDA dan PDB Hijau Nasional. Untuk Tahun 2017, ditargetkan dokumen neraca SDA dan PDRB Hijau Nasional sudah mulai tersusun yang didasarkan atas data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup (neraca SDA LH dan PDRB Hijau) daerah.

C. Evaluasi kinerja KPA berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan

Evaluasi kinerja terhadap Komisi Penilai Amdal (KPA) pemeriksa UKL UPL pada instansi Lingkungan Hidup daerah serta evaluasi mutu dokumen lingkungan hidup yang disusun oleh LPJP dan perorangan dilaksanakan untuk menjaga dan memperkuat kapasitas KPA dan persyaratan lisensi KPA, ketersediaan peraturan di daerah terkait penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL serta untuk menilai antara lain kesesuaian, konsistensi dan kedalaman dokumen lingkungan yang disusun. Hal tersebut didukung oleh Standar Operating Procedure (SOP) dan pengembangan database, pembinaan dan evaluasi kinerja komisi penilai amdal, pemeriksa UKL-UPL daerah serta evaluasi mutu dokumen amdal. Prioritas lokus untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Lokus Prioritas tahun 2017	
Provinsi	Kab/Kota
Banten	Kota Serang
	Kab Serang
Jawa Barat	Kota Banjar
	Kab Tasikmalaya
	Kab Sumedang
	Kab Subang
Jawa Tengah	Kab Banyumas
	Kab Jepara
Jawa Timur	Kota Malang
	Kota Batu
DIY	Kab Sleman
	Kab Kulon Progo
Aceh	Kab Aceh Singkil
	Kab Aceh Barat
Sumatera Utara	Kab Deli Serdang
	Kab Pematang Siantar
Bangka Belitung	Kab Bangka Tengah
	Kab Bangka Selatan
Sumatera Barat	Kab Pasaman Barat

Lokus Prioritas tahun 2017	
Provinsi	Kab/Kota
	Kab Pasaman
Kepulauan Riau	Kab Tanjung Pinang
	Kota Batam
Sumatera Selatan	Kab Ogan Komering Ilir
	Kab Ogan Komering Ulu
Jambi	Kab Tanjung Jabung Barat
	Kota Jambi
Bengkulu	Kab Bengkulu Utara
	Kab Rejang Lebong
Riau	Kab Rokan Ulu
	Kota Rokan Ilir
Lampung	Kab Lampung Barat
	Kab Lampung Utara
Bali	Kab Gianyar
	Kab Klungkung
NTB	Kab Bima
	Kab Dompu
NTT	Kab Sumba Timur
	Kab Sumba Barat Daya
Kalimantan Selatan	Kab Tapin
	Kab Banjar
Kalimantan Timur	Kab Berau
	Kab Kutai Timur
Kalimantan Barat	Kab Sanggau
	Kab Sekadau
Kalimantan Tengah	Kab Barito Selatan
	Kota Palangkaraya
Sulawesi Selatan	Kab Waju
	Kab Barru
Sulawesi Utara	Kab Bolaang Mongondow
	Kab Bolaang Mongondow Timur
Sulawesi Tenggara	Kab Konawe Utara
	Kab Konawe

Lokus Prioritas tahun 2017	
Provinsi	Kab/Kota
Sulawesi Barat	Kab Mamuju
	Kab Mamuju Utara
Sulawesi Tengah	Kab Poso
	Kota Parigi
Gorontalo	Kab Bone Bolango
	Kab Gorontalo Utara
Maluku Utara	Kab Halmahera Selatan
	Kab Halmahera Tengah
Maluku	Kab Seram Bagian Barat
	Kota Ambon
Papua	Kab Merauke
	Kota Jayapura
Papua Barat	Kab Biak
	Kab Sorong Selatan
Kalimantan Utara	Kab Nunukan
	Kota Tarakan
DKI Jakarta	

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 750 Miliar. Oleh karenanya, **penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017.**

3.KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

Secara umum Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2017 diharapkan dapat memastikan tahapan penetapan kawasan hutan sesuai target minimal RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019 dapat dicapai, pengalokasian kawasan hutan untuk kesejahteraan rakyat dan mendukung ketahanan pangan, energi dan air dapat terkendali, 309 KPH baru telah ditetapkan areal dan terbentuk kelembagaanya, RPPLH telah menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta terjaminnya kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung, serta terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan bagi usaha dan kegiatan.

Selain target kinerja sesuai RPJMN tahun 2015-2019, dengan adanya "inisitaif baru" dalam RKP Tahun 2017, maka secara khusus terdapat target pembangunan yang harus dicapai/didukung keberhasilannya terutama terkait dengan alokasi sumberdaya hutan/lahan dalam rangka pembangunan sawah baru, reforma agraria, analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2017 (atau akumulasi s/d Tahun 2017**)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
Terselesaikannya penetapan kawasan hutan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2017
Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha
Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 juta ha

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2017 (atau akumulasi s/d Tahun 2017**)
Tersedianya dan tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	34 provinsi
Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Selesai 100 %	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	<ul style="list-style-type: none"> - Data dan Informasi SDH Nasional - Data dan Informasi 100 KPH (458 KPH sampai 2017) - Informasi Geospasial LHK terintegrasi dalam jaringan geospasial nasional untuk mendukung kebijakan satu peta (one map policy)
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
Pembentukan unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	172 KPH* (309 KPH sampai 2017) dan 34 Provinsi
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen/judul/layanan
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	170 KLHS* 187 KLHS*
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional, 8 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 1 penetapan indikasi DD DT nasional, 12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusra.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2017 (atau akumulasi s/d Tahun 2017**)
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional/tematik
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	100%
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	
Penyiapan Prakondisi Pembangunan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Batas KH 9.010 km* - Inventarisasi SDH 545 klaster* - Fasilitasi Pembangunan 172 KPH*
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017

Ket: * akumulasi target tahun 2017 serta target tahun 2015 dan 2016 yang belum tercapai

** merupakan target maksimal dan akan disesuaikan kembali berdasarkan ketersediaan anggaran

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan melaksanakan lebih banyak kegiatan serta volume fisik yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, sehingga untuk dapat mencapai target kegiatan tahun 2017, kebutuhan anggaran bagi seluruh Satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu minimal sebesar Rp.750 Milyar. Oleh karenanya, apabila ketersediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dapat dipastikan target kegiatan/kinerja tahun 2016 tidak dapat tercapai 100%.

Selain ketersediaan anggaran, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak akan dapat terlepas dari dukungan dan kondisi pemungkin (*enabling condition*) di dalam upaya pencapaiannya, seperti:

1. Peran aktif Kementerian dan instansi terkait khususnya terhadap target pencetakan sawah Baru dan areal pangan lainnya, penyelesaian TORA, Amdal, KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan.
2. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang terdapat dalam Panitia Tata Batas.
3. Dukungan dan kerjasama Eselon I lainnya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pembangunan dan operasional KPHP dan KPHL.

4. Dukungan penuh pemerintah daerah di dalam penyiapan kelembagaan dan syarat administrasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan hutan tingkat tapak (KPH).
5. Dukungan mitra/para pihak lainnya.

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan tahun 2017 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir. Volume/target kegiatan dalam matriks Rencana Kerja tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sesuai pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 340,9 Milyar sehingga dipastikan tidak dapat memenuhi target kebijakan yang telah diuraikan di atas. Kegiatan dan volume/target tersebut masih memungkinkan untuk direvisi/disesuaikan apabila terdapat perubahan regulasi maupun kebijakan pemerintah lainnya yang menyebabkan perubahan sasaran pembangunan.

4. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 merupakan acuan utama bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2017 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Tahun 2017, yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2017, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 dan DIPA TA. 2017 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017.

LAMPIRAN

I. KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan		
Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan	Kawasan hutan yang selesai ditetapkan	1. Penelaahan dan penyelesaian bahan/substansi penetapan kawasan hutan.	Tersedianya hasil penelaahan dan bahan/substansi penetapan kawasan hutan	Draft Usulan/SK penetapan kawasan hutan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2017	001	Penelaahan dan pembahasan peta hasil tata batas kawasan hutan (usulan penetapan kawasan hutan)			
						002	Proses Pengesahan BATB			
						003	Identifikasi batas kawasan hutan yang telah ditatabatas temu gelang			
						004	Pembahasan dan Penyusunan peta dan draft SK penetapan kawasan hutan			
		2. Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian penataan batasa kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	Proses penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan terkendali sesuai aturan dan rencana	minimal 4.000 km tata batas terlaksana dan terkendali	001	Monitoring tata batas kawasan hutan			
						002	Bimbingan teknis tata batas kawasan hutan			
						003	Penyelesaian permasalahan kawasan hutan			
						004	Pemutakhiran peta kawasan hutan			
Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1. Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Tersedianya informasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnva	Data dan Peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnva	1 Juta Ha hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan terpetakan	001	Pengumpulan bahan dan data dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya			
						002	Penelaahan lokasi kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Termasuk kegiatan cek lapangan (uji petik) terhadap kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya		
						003	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya			
						004	Pelaporan hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya			
		2. Penetapan arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Terbitnya arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Penetapan arahan indikatif lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 Juta Ha kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan ditetapkan	001	Penyiapan penetapan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya			
						002	Sosialisasi hasil penetapan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya			
		Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	1. Identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya informasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 Juta Ha hasil identifikasi lokasi TORA terpetakan	001	Pengumpulan bahan dan data dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	
								002	Penelaahan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Termasuk kegiatan cek lapangan (uji petik) terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan
						003	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	
						004	Pelaporan hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	
		2. Pembahasan dan Penetapan arahan indikatif kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Terbitnya Penetapan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Penetapan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 Juta Ha lokasi TORA di kawasan hutan ditetapkan	001	Penyiapan keputusan penetapan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	
						002	Sosialisasi hasil penetapan lokasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	
Tersedianya dan Tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	1. Penyiapan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Tersedianya data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan tersedia dan dapat diakses	1 judul/dokumen/ layanan	001	Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
						002	Penyajian/pengelolaan sistem informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
						003	Pelayanan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
						004	Koordinasi dengan instansi terkait data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
		2. Sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Terlaksananya sosialisasi batas kawasan hutan kepada publik	Batas kawasan hutan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	001	Sosialisasi batas kawasan hutan	
Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	1. Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	Tersedianya hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	Dokumen hasil penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	100 % bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku)	001	Penelaahan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk pada lokasi pemukiman transmigrasi	
		2. Penyelesaian SK Perubahan kawasan hutan	Terselesaikannya Draft SK Perubahan kawasan hutan	Draft SK Perubahan kawasan hutan	Draft SK perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (100%)	001	Pembahasan dan penyusunan draft keputusan Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	
		3. Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan terkendali	1 judul/dokumen	001	Analisis dan evaluasi penatagunaan kawasan hutan	
						002	Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	
						002	Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi dan peruntukan (pelepasan) kawasan hutan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Keterangan
			Good Governance Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		Nilai saki minimal 75	001 Pelayanan Operasional Perkantoran	
						002 Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003 Penyusunan Rencana Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
						004 Koordinasi kegiatan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
						005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

II. KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan	
Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH Mendukung Pengalokasian KH untuk Perhutanan Sosial	Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Tersedianya Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional	34 Provinsi	001	Penyusunan NSDH Nasional		
						002	Pembuatan Peta NSDH		
						003	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Nasional		
						004	Monev Penyusunan NSDH Provinsi		
						005	Uji Petik Inventarisasi Hutan Nasional		
						006	Penghitungan Potensi SDH Nasional		
						007	Penyusunan Peraturan Bidang Inventarisasi Hutan		
		Penyelenggaraan Pemantauan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemantauan SDH Nasional	Data dan Informasi Hasil/Pelaksanaan Pemantauan SDH Nasional	34 Provinsi	001	Pemantauan SDH Nasional		
	002					Penerapan sistem manajemen mutu (ISO) dalam standarisasi Pemantauan SDH			
	003					Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh			
	004					Penelaahan Penutupan Lahanpada Areal IUPHHK HA/HT dengan Citra Resolusi sedang/tinggi			
		Jumlah KPH yang telah Memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan pada KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan pada KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi SDH	100 KPH	001	Bimbingan Teknis Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)	
	002						Penyediaan Data dan Informasi Potensi SDH KPH		
		Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	Terselenggaranya Pemetaan SDH Nasional	Hasil/Pelaksanaan Pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	001	Penelaahan Peta Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
002	Dokumentasi Data dan Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
003	Pembahasan dan Penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut								
004	Penghitungan Deforestasi Indonesia								
005	Rekalkulasi Penutupan Lahan								
006	Sosialisasi Teknis Pemetaan Tematik								

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Terselenggaranya Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Sistem Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	34 Provinsi	001	Penyusunan Basis Data Spasial LHK	
						002	Penyempurnaan Web GIS LHK	
						003	Pengelolaan Jaringan Data Spasial	
						004	Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	
						005	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Spasial	
						006	Bimbingan Teknis Integrasi Jaringan Data Spasial LHKL	
						007	Inhouse Training Pemotretan Udara	
						008	Pengoperasian dan Pemeliharaan Mikrolight Trike	
						009	Monev Pengoperasian Pesawat Mikrolight Trike	
			Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		Nilai sakip minimal 75	001	Pelayanan Operasional Perkantoran	
						002	Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003	Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
						004	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
						005	Koordinasi Kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	

III. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN TAHUN 2017

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinya sesuai peraturan yang berlaku	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani dan terkendali	100% diterbitkan izin bagi pemohon penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	001	Penelaahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
						002	Klarifikasi/Identifikasi Permasalahan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	
						003	Bimbingan Teknis Bidang Penggunaan Kawasan Hutan	
						004	Supervisi Kegiatan Monitoring/Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	
						005	Identifikasi/Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Lahan Kompensasi	
		Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	minimal 80% dari total target PNBK PKH tahun 2017	001	Bimbingan teknis penyusunan kelengkapan Dokumen PNBK, 6 lokasi	
						002	Monitoring Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, 6 propinsi	
						003	Supervisi Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, 6 Propinsi	
Pembentukan unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	100 KPH	001	Penelaahan dan pembahasan peta usulan penetapan KPH	
						002	Penyusunan dan Penyajian peta penetapan KPH	
		Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Prakondisi Pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud dengan optimal	100 KPH	001	Penyusunan Substansi Peraturan Perundangan Prakondisi Pembangunan KPH	
						002	Koordinasi Pembangunan KPH	
						003	Bimbingan Teknis Pembangunan KPH	
						004	Penguatan Kelembagaan Untuk Pengelolaan SDA Berbasis Masyarakat (Hibah Luar Negeri)	
		Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun /terupdate	34 Provinsi	001	Penelaahan dan pembahasan arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 provinsi
002	Penyusunan/Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 provinsi							
003	Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Penyiapan KHDTK							

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan	
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 provinsi	Arahan Pemanfaatan Hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 Provinsi	001	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan		
						002	Penyusunan pedoman/juknis/juklak terkait arahan pemanfaatan hutan		
	Seluruh KPH terintegrasi dalam tata Ruang Wilayah	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung KPH	Penataan ruang kawasan hutan mendukung KPH		100 KPH	001	Pembahasan dan Penyusunan Draft Rencana Kawasan Hutan	
							002	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Mendukung KPH	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Mendukung 600 KPH (Wilayah I dan II)
	Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan/review	100% usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP diselesaikan sesuai aturan yang berlaku			001	Penelaahan dan pembahasan usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP	Perubahan Kawasan Hutan dalam review RTRWP dilakukan berdasarkan usulan Gubernur
							002	Penyusunan draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP	Perubahan Kawasan Hutan dalam review RTRWP dilakukan berdasarkan usulan Gubernur
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK (Target 2017 : 100 KPH)	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan Mendukung KPH		100 KPH	001	Integrasi Rencana Pengelolaan Tingkat Tapak dan Rencana Kehutanan Daerah dengan RKTN	
							002	Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang perencanaan makro kehutanan	
							003	Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Makro Kehutanan	
							004	Review RKTN Tahun 2011-2030	
	Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan Kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 Provinsi	001	001	Pemantauan rencana dan kegiatan kehutanan daerah		
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul/layanan data dan informasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	001	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH	
						002	002	Supervisi laporan pemenuhan kewajiban pemegang izin PPKH	
						003	003	Update data dan informasi penggunaan kawasan hutan	
						004	004	Pengolahan dan analisis data penggunaan kawasan hutan	
						005	005	Publikasi penggunaan kawasan hutan	
						006	006	Konfirmasi lokasi permohonan	
						007	007	Penataan Arsip pada Direktorat RPPWPH	
						008	008	Penyusunan data dan informasi pembangunan KPH	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
						009 Pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi KPH	
						010 Pengelolaan WEB KPH	
						011 Penyelenggaraan Publikasi KPH	
						012 Pengintegrasian data dan informasi tematik kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan dan KPH ke dalam peta dasar RBI 1:50.000 dalam rangka mendukung kebijakan satu peta	
			Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		Nilai sakip minimal 75	001 Layanan Perkantoran	
						002 Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003 Penyusunan Rencana Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
						004 Koordinasi kegiatan bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
						005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

IV. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS rencana tata ruang laut nasional	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional	KLHS RTRLN yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	1 KLHS RTRLN	001	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis KLHS RTRLN
						002	Validasi kelayakan KLHS RTRLN
		Pengendalian dan Penjaminan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	Terjaminnya kelayakan dan kualitas KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir yang terjamin kelayakan dan kualitasnya	6 KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir	001	Bimbingan Teknis KLHS RZWP
						002	Validasi kelayakan KLHS RZWP
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Terjaminnya Kualitas KLHS berbasis DDDT	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	minimal 10 KHLS	001	Penyusunan NSPK KLHS
						002	Bimbingan Teknis KLHS daerah
	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	Tereviewnya kelayakan Dokumen KLHS	Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya	minimal 15 KHLS	001	Validasi kelayakan KLHS Sektor
						002	Validasi kelayakan KLHS Provinsi
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen review 5 Tahunan)	Penyusunan/Penyempurnaan/Review RPPLH Nasional	Tersusunnya/Terreviewnya Dokumen RPPLH Nasional	Hasil Review Dokumen RPPLH Nasional	1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional	001	Penyusunan NSPK RPPLH Nasional
						002	Midterm Review RPPLH Nasional
						003	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	minimal 5 RPPLH Provinsi	001	Penyusunan NSPK RPPLH Provinsi
						002	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	RPPLH Kab/Kota yang tersusun sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	minimal 10 RPPLH Kab/Kota	001	Penyusunan NSPK RPPLH Kab/Kota
						002	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung LH Nasional	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	001	Penetapan indikasi DDDT lingkungan hidup nasional
						002	Pengembangan NSPK dan metode DDDT Lingkungan Hidup
						003	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis DDDTLH daerah
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	12 Satuan Peta ekoregion jawa dan 27 satuan peta ekoregion Bali, Nusra	001	Pemetaan Ekoregion	
					002	Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Ekoregion	
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDA LH dan PDRB Hijau Nasional/Tematik (Data dan Informasi Neraca SDA LH dan PDRB Hijau)	001	Fasilitasi Penyusunan Neraca SDA LH Tematik
						002	Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB yang disesuaikan
						003	Fasilitasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan
						004	Pengembangan NSPK dan metoda Instrumen ekonomi lingkungan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
			Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		Nilai sakip minimal 75	001 Layanan perkantoran	
						002 Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003 Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
						004 Koordinasi kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
						005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

V. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100%	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL, UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan	50 dokumen Amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan	001	Penilaian Dokumen AMDAL	
						002	Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL	
		Pengembangan Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	Tersedianya Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	1 Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	001	Penyediaan Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	
						002	Uji coba dan simulasi Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	
						003	Sosialisasi Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan secara Online	
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	001	Penyusunan pedoman sektor skala prioritas	
		Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	001	Penyediaan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis Informasi Geospasial	
		Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Terselenggaranya Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan dan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	100%	001	Penilaian Audit Lingkungan	
						002	Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan	Pengembangan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan	Tersedianya Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan	Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan	1 Sistem Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan	001	Penyusunan SOP Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan	
						002	Pengembangan Database	
003						Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal Daerah dan Penyusun Amdal LPJP/Perorangan di 34 Provinsi dan 68 Kab/Kota		
Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		Tersedianya Jumlah Lembaga/Instansi yang memiliki Kompetensi di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah Lembaga/Instansi yang memiliki Kompetensi di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	50 lembaga/instansi	001	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
			Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		Nilai saki minimal 75	001 Layanan operasional perkantoran	
						002 Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003 Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
						004 Koordinasi kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
						005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point); target tahun 2017 sebesar 75 point	Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	4 Dokumen/ layanan	001	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, 1 Dokumen	
						002	Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017, 1 Dokumen	
						003	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2018, 1 Dokumen	
						004	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 1 Dokumen	
						005	Koordinasi Program dan Anggaran dengan instansi terkait	
						006	Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
				Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	6 Dokumen/ layanan	001	Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						002	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						003	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						004	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						005	Monev Pelaksanaan Rencana Aksi (1 Dokumen)	
						006	Monitoring Pelaksanaan SPIP di 28 Satker Pusat dan Daerah	
				Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 Dokumen/ Layanan	001	Penyusunan Buletin Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Berbasis Kawasan	
							Penyusunan Bahan Rapat serta Tindak Lanjut Pimpinan dengan DPR	
							Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan				
							Pemuktahiran Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
							Penyusunan Buku Pintar Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016				
						002	Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016				
						003	Penyusunan Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016				
		Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Dokumen/ layanan	001	Penyusunan Analisa Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tahun 2017 fokus pada penyusunan Analisa Jabatan BPKH			
								002	Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan	Tahun 2017 fokus pada penyempurnaan prosedur kerja BPKH	
								003	Penyusunan Tata Hubungan Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
								004	Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
							Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen/ layanan	001	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	
									002	Koordinasi masalah kepegawaian dengan instansi terkait	
									003	Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	
									004	Pembinaan Aparatur Sipil Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
							Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 Dokumen/ Layanan	001	Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
									002	Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
				003	Peningkatan Kualitas SDM Planologi Bidang Pengadaan Barang/Jasa						
				004	Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai dan Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Keterangan			
		Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya rancangan peraturan perundangan, tertanganinya permasalahan hukum, dan terselenggaranya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	5 Draft	006	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
	007					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan, 2 lokasi				
					Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	2 Dokumen/ layanan	008	Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
				009			Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
				Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Dokumen/ layanan	001	Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
						002	Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
						003	Asistensi Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
				Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersusunnya Laporan SIMAK-BMN	3 Dokumen/ Layanan	001	Bimbingan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian BMN (Waadal BMN) lingkup Ditjen PKTL	
								002	Penyusunan Laporan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan SIMAN dan SIMAK BMN (UAKPB dan UAPPB-E1)
		003	Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					Dokumen penetapan status, penggunaan BMN, Hibah, Penghapusan, Proses Penetapan, dll		
		004	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkanotran					Pemeliharaan gedung kantor, peralatan mesin, kendaraan dinas dan layanan pengadaan (ULP)		
				Tersusunnya Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan	3 Dokumen/ layanan	001	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
				Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Penyusunan Laporan Keuangan SekretariatDitjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
					Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan					
					Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Keterangan
						002 Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan serta Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Keuangan Negara
						003 Tata Kelola Administrasi Keuangan	Termasuk pengelolaan belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja satker pusat),
				Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	1 Dokumen/ layanan	001 Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	
						002 Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						003 Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	
						004 Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						005 Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	
				Laporan penyusunan TL-LHP	1 Dokumen/ layanan	001 Penelaahan dan Pemantauan tindak lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	

VII. KEGIATAN PENYIAPAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I-XXII**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan	Tata batas kawasan hutan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	minimal 4.000 km	001	Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang ditunjuk	
						002	Inventarisasi Trayek batas	
						003	Pembuatan/Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan	
						004	Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan	
						005	Pembahasan Hasil Tata Batas Sementara	
						006	Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan	
						007	Pembahasan Hasil Tata Batas Definitif	
						008	Supervisi Penataan Batas Kawasan Hutan	
						009	Bimbingan dan Pengawasan Penataan Batas Kawasan Hutan	
						010	Pembahasan BATB	
Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan KPH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	Terselesaikannya rancangan Tata Hutan dan rancangan Rencana Pengelolaan KPH	Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	minimal 40 KPH	001	Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah KPH (Inventarisasi Hutan/Biofisik) dan Sosial Budaya)		
					002	Penyusunan Rencana Tata Kelola Hutan di Wilayah KPH	Penyusunan Rencana Tata Kelola Hutan, Fasilitasi Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	
					003	Supervisi Inventarisasi Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah KPH	Supervisi Inventarisasi Hutan Mendukung KPH di 22 wilayah kerja BPKH	
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Data dan Informasi sumberdaya hutan	Data dan Informasi sumberdaya hutan	minimal 100 Klaster	001	Inventarisasi Sumber Daya Hutan Nasional Mendukung KPH	Kegiatan inventarisasi sumber daya hutan nasional mendukung KPH di 22 wilayah kerja BPKH	
					002	Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu		
					003	Kajian Potensi Sumber Daya Hutan		
					004	Publikasi Hasil Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Publikasi Hasil Inventarisasi Sumber Daya Hutan di 22 wilayah kerja BPKH	
Seluruh Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan terlaksana dan terkendali	Pengendalian pemantapan kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Proses pemantapan kawasan hutan berjalan optimal dan terkendali sesuai aturan dan rencana	100%	001	Pemutakhiran Tanda Batas Kawasan Hutan (Orientasi/Rekonstruksi)	Pemutakhiran Tanda Batas Kawasan Hutan (Orientasi/Rekonstruksi) di 22 wilayah kerja BPKH	
					002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan		
					003	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan	Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH	
					004	Penegasan Batas Kawasan Hutan		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Keterangan	
						005	Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan	
						006	Penyusunan Buku Rencana Pemantapan Kawasan Hutan	Penyusunan Buku Rencana Pemantapan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						007	Inventarisasi hutan dalam rangka pengukuhan dan penetapan kawasan hutan	
						008	Pengendalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Pengendalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						009	Verifikasi PNPB Penggunaan KH	
						010	Pemetaan/Pemantauan Hutan dengan Ultralight/Mikrolight Trike	Pemeliharaan/Operasionalisasi pesawat ultralight/ mikrolight, Peningkatan kemampuan tenaga pemotretan udara dengan ultralight, Peningkatan kemampuan teknisi ultralight/mikrolight, Pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight, Uji coba pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight, Pelatihan pilot ultralight/mikrolight
						011	Pelaksanaan Pelatihan Pilot Mikrolight trike Tingkat Lanjutan	
						012	Penafsiran Citra Resolusi Sedang/Tinggi	
						013	Ground Check Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang/Tinggi	
						014	Pembuatan Peta Digital Tematik Kehutanan	
						015	Pembuatan Peta Skala Kabupaten	
						016	Sinkronisasi Data Sumber Daya Hutan	
						017	Penyusunan Database Sumber Daya Hutan	
						018	Pelayanan dan Dokumentasi Peta Kehutanan	
			Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Kawasan Hutan	Dukungan Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan dari Pihak-pihak terkait (Publik)	100%	001	Forum Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	Pelaksanaan forum koordinasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						002	Forum Koordinasi Pembangunan KPH	Forum Koordinasi Pembangunan KPH di 22 wilayah kerja BPKH
						003	Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan	Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						004	Koordinasi percepatan penetapan kawasan hutan	
						005	Penyusunan Sistem Data dan Informasi Pemantapan KH Berbasis Web	
						006	Koordinasi penyerahan fasilitasi pembangunan KPH	
						007	Monitoring/Evaluasi Pembangunan KPH	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2017	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/ Elemen Kegiatan)	Keterangan
				Good Governance Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019; target tahun 2017 sebesar 75,00	Nilai saki minimal 75	001 Pelayanan Operasional Perkantoran (Belanja Pegawai + TUKIN BPKH + Belanja Operasional)	Belanja Pegawai, Tunjangan Kinerja serta belanja operasional di 22 wilayah kerja BPKH
						002 Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan peralatan dan fasilitasi perkantoran di 22 wilayah kerja BPKH Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2018 Penyusunan ROK Tahun 2017 Penyusunan LAKIP Tahun 2016 Penyusunan Laporan Keuangan
						003 Penyusunan Laporan Pengelolaan Satker	Penyusunan/Pengelolaan laporan SAI, Laporan SIMAK BMN Penyusunan Laporan SPI Penyusunan statistik tahun 2016 Penyusunan Laporan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
						004 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker di 22 wilayah kerja BPKH
						005 Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran di 22 wilayah kerja BPKH
						006 Peningkatan Kapasitas SDM Satker BPKH	Peningkatan kapasitas SDM di 22 wilayah kerja BPKH
						007 Pembinaan SDM Satker BPKH	
						008 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	
						009 Seminar Kegiatan Jabatan Fungsional	
						011 Pemeliharaan Gedung/Bangunan	
						012 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Bermotor	
						013 Kegiatan Koordinator Wilayah UPT Kementerian	
						014 Pengelolaan Arsip	
						015 Rapat Koordinasi/Pembahasan Warsi	
						016 Upgrading verifikator PNB-PKH	
						017 Laporan evaluasi dan Konsultasi ULP	
						018 Pengembangan Manajemen Kantor	Pengembangan manajemen kantor di BPKH